



**BUPATI POSO**

**KEPUTUSAN BUPATI POSO**

**NOMOR : 188.45 / 0633 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN POSO TAHUN 2022**

**BUPATI POSO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.

**KEDUA :** Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;

- b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan atau proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45 / 0633 / 2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
- II. WAKIL KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- III. WAKIL KETUA II : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB POSO
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BAPELITBANGDA KAB.POSO  
2. KEPALA BKAD KAB.POSO  
3. KABAG HUKUM DAN HAM SETDAKAB POSO  
4. ANALIS KEBIJAKAN / ADMINISTRASI PEMERINTAHAN & KERJASAMA  
5. ANALIS KEBIJAKAN/OTONOMI DAERAH  
6. ANALIS KEBIJAKAN/ ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG